

## Pentingnya kinerja keuangan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia

Khairudin<sup>1</sup>, Aminah<sup>2</sup>, Appin Purisky Redaputri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung, Lampung.

<sup>1</sup>Email: khairudin@ubl.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memotret kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah daerah di Indonesia serta membuktikan secara empiris pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, dimana kinerja keuangan diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan keuangan daerah sedangkan kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian hipotesis. Hasil penelitian berdasarkan periode pengamatan menemukan bukti bahwa (1) kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah daerah di Indonesia belum begitu baik; (2) kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat; (3) efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat; (4) efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan (5) pertumbuhan keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini telah mengkonfirmasi stakeholder theory, dimana sebagai sebuah organisasi pemerintah daerah telah memberi manfaat kepada para stakeholder diantaranya adalah berupa kesejahteraan bagi masyarakat meskipun belum sesuai dengan harapan.

**Kata Kunci:** Kinerja keuangan; kesejahteraan masyarakat

## *The importance of local government financial performance to improve the welfare of the people in Indonesia*

### Abstract

*This study aims to photograph the financial performance and welfare of the community in local governments in Indonesia and empirically prove the effect of financial performance on public welfare. This research was conducted on district / city governments in Indonesia, where financial performance is measured by the ratio of regional financial independence, the ratio of regional financial effectiveness, the ratio of regional financial efficiency and the ratio of regional financial growth while public welfare is measured by the Human Development Index (HDI). Testing is done by using hypothesis testing. The results of the study based on the observation period found evidence that (1) financial performance and welfare of the community in local governments in Indonesia were not so good; (2) the independence of regional finances has a positive and significant effect on people's welfare; (3) the effectiveness of regional finances has a positive and not significant effect on people's welfare; (4) regional financial efficiency has a positive and significant effect on public welfare and (5) regional financial growth has a negative and significant effect on public welfare. This research has confirmed stakeholder theory, where as a local government organization has benefited stakeholders including welfare for the community, although not in line with expectations.*

**Keywords:** Financial performance; public welfare

---

---

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa seluruh daerah di tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Khusaini, 2006).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya dapat diwujudkan jika pemerintah daerah memiliki kinerja keuangan yang baik, karena tanpa adanya dukungan dana, maka kegiatan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum dalam rangka merealisasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak akan dapat berjalan dengan baik. Artinya bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, apabila pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang meningkat juga (Christy dan Adi, 2009).

Namun fakta yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera setiap tahunnya rata-rata meningkat tidak lebih dari 1%, sedangkan realisasi pendapatan daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera rata-rata meningkat lebih dari 10% setiap tahunnya. Artinya pertumbuhan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (BPS-RI, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah belum cukup efektif untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

## METODE

Penelitian ini dilakukan terhadap 114 pemerintah kabupaten dan 32 pemerintah kota di Sumatera sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS-RI) berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) berupa Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur melalui rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan keuangan daerah (Halim, 2004) sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (UNDP, 1990). Pengujian dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Adapun model regresi pada penelitian ini adalah:

$$KM = a + KKD + et.....$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil statistik deskriptif rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan keuangan daerah serta indeks pembangunan manusia pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Std. Deviation	Mean
Rasio Kemandirian	146	2	43	6.35	8.60
Rasio Efektivitas	146	16	195	20.22	96.15
Rasio Efisiensi	146	70	169	12.13	94.95
Rasio Pertumbuhan	146	-35	68	16.40	9.11
IPM	146	57	98	5.49	68.65
Valid N (listwise)	146				

Tabel statistik deskriptif tersebut menginformasikan bahwa kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah daerah di Indonesia belum begitu baik, dimana nilai mean rasio kemandirian keuangan daerah hanya sebesar 8,6% (termasuk dalam kriteria penilaian rendah sekali dengan pola hubungan instruktif); nilai mean rasio efektivitas keuangan daerah berada diatas nilai 90% (termasuk dalam kriteria efektif); nilai mean rasio efisiensi keuangan sebesar 96% (berada diatas 60% dan termasuk dalam kriteria kurang efisien) serta nilai mean rasio pertumbuhan keuangan daerah masih rendah karena berada dibawah 10%. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Khairudin dan Aminah (2017) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah daerah di Propinsi Lampung belum begitu baik.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Pengujian hipotesis

	Coefficient	t statistic	Sig	Kesimpulan
Kemandirian Kesejahteraan Masyarakat	.467	7.692	0.000	Terkonfirmasi
Efektivitas Kesejahteraan Masyarakat	.087	2.347	0.020	Terkonfirmasi
Efisiensi Kesejahteraan Masyarakat	.022	1.981	0.035	Terkonfirmasi
Pertumbuhan Kesejahteraan Masyarakat	-.076	-2.781	0.041	Terkonfirmasi

Tabel pengujian hipotesis menginformasikan bahwa nilai koefisien kemandirian keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah 0,467; t\_statistik sebesar 7.692 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 maka hipotesis pertama dapat dikonfirmasi. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Gousario dan Dharmastuti (2015); Simanjuntak dan Mukhlis (2015); Iskandar dan Subekan (2014); Amalia dan Purbadharmaja (2014) dan Dewi dan Sutrisna (2014) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Sementara menurut Lucky (2013) kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh langsung yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Gamayuni (2016) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai signifikan untuk hipotesis kedua sebesar 0,020, sehingga hipotesis kedua juga dapat dikonfirmasi. Temuan ini tentunya mendukung hasil penelitian Gousario dan Dharmastuti (2015); dan Iskandar dan Subekan (2014) yang mengungkapkan bahwa efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Gamayuni (2016) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis ketiga juga dikonfirmasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien efisiensi keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah 0,022; t\_statistik sebesar 1.981 dan nilai signifikansi sebesar 0,035. Sehingga efisiensi keuangan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat terbukti. Temuan ini mendukung penelitian Iskandar dan Subekan (2014) yang menyatakan efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan dengan efisiensi penggunaan dana, maka program-program kerja pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat berjalan dengan maksimal. Penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi hipotesis keempat, dimana hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien pertumbuhan keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah -0,076; t\_statistik sebesar -2.781 dan nilai signifikansi sebesar 0,041. Hal ini dikarenakan alokasi belanja yang dilakukan pemerintahan daerah masih berfokus pada menghabiskan anggaran bukan berdasarkan *outcome* yang akan dihasilkan, sehingga kesejahteraan masyarakat masih menjadi persoalan.

## SIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengkonfirmasi bahwa (1) kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah daerah di Indonesia belum begitu baik (2) kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat; (3) efektivitas keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat; (4) efisiensi keuangan daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan (5) pertumbuhan keuangan daerah memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi dari hasil temuan ini adalah pemerintah daerah harus segera meningkatkan pendapatan

asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak; pemerintah daerah harus segera meningkatkan orientasi penggunaan anggaran untuk belanja modal; pemerintah daerah harus segera membuat aturan ketat untuk penggunaan anggaran yang harus fokus pada outcome yang dihasilkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F.R. dan Purbadharmaja, Ida Bagus Putu. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 3, No. 6
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2016. Indonesia Dalam Angka.
- Christy, Fhino Andrea dan Adi, Priyo Hari. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. The 3rd National Conference UKWMS, Surabaya.
- Dewi, P.A.K dan Sutrisna, I Ketut. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 4, No. 1.
- Gamayuni, Rindu Rika, 2016. The Effect of Local Government Characteristics and the Examination Result of Indonesian Supreme Audit Institution on Economic Growth, with Financial Performance as Intervening Variable in District and City Government of Lampung Province. Research Journal of Finance and Accounting. Vol.7, No.18, 2016
- Gousario, Freska dan Dharmastuti, Christiana Fara. 2015. Regional Financial Performance and Human Development Index Based on Study in 20 Counties/Cities of Level I Region. Journal The Winners. Vol. 16 No. 2, September 2015.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.
- Iskandar, Azwar dan Subekan, Achmat. 2014. Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat di Era Desentralisasi Fiskal : Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012. Jurnal STAN Vol. I/XII/2014.
- Khairudin dan Aminah. 2017. Analysis of Effectiveness of New Region Expansion in Lampung Province. Review of Integrative Business and Economics Research, Vol.6, Issue 3
- Khusaini, Muhammad. 2006. Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah, BPFE Universitas Brawijaya.
- Lucky, Dihan. 2013. Analysis of The Effect of Regional Financial Performance to Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure. Journal of Economics and Sustainable Development. Vol.4, No.19, 2013
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Mukhlis, Imam. 2015. Empirical Study about The Interaction Between Equalization Funds, Regional Financial and Human Development Index in Regional Economic. International Journal of Economics and Finance; Vol. 7, No. 1; 2015 ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UNDP. 1990. Human Development Report 1990. New York : Oxford University Press.